

## TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI KOMPUTER

Muhammad Askal Basir <sup>1</sup>, Indra Gunawan <sup>2</sup>, Wa Ode Nazila <sup>3</sup>, Ahmad Muhardin Hadmar <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>2,3,4</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Buton

Email: askal16basir@gmail.com

---

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. Tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan yaitu 1) Untuk memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa menggunakan teknologi (*Computer*) kepada aparatur desa. 2) Untuk memberikan pemahaman kepada para aparatur desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Bahari. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu 1) Aparatur Desa Bahari telah memahami penataan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016. 2) Aparatur Desa Bahari telah mengetahui tata cara pembuatan dan pengisian administrasi pemerintahan desa menggunakan *Computer*, dan dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Administrasi Desa, Sistem Aplikasi Computer

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa, penataan administrasi perlu dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilakukan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggara kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja, dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya (Suherman, 2019).

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi pemerintah. Agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, aparat pemerintah harus memiliki kualitas yang memadai (Sondakh et al., 2014).

Pemerintahan Desa merupakan sub-sistem dari pemerintahan nasional yang menjadi pondasi pemerintahan pusat dalam menerima data dan informasi untuk penentuan berbagai kebijakan pemerintahan secara nasional. Keberhasilan penataan administrasi pemerintahan desa merupakan cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Semakin baiknya penataan administrasi desa, *good governance* desa atau tata kelola pemerintahan desa semakin baik (Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, 2019).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa (Tampongangoy, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem informasi desa menjadi suatu pendukung yang sangat besar dalam mengelola basis data serta mendukung tata kelola desa secara akuntabel dan transparan (Taufiq, Otong Husni & Hermawandi, 2007).

Agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah desa harus didukung oleh administrasi desa yang benar. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan administrasi pemerintahan di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah desa yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, perangkat desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi.

Berdasarkan observasi TIM PKM, masalah utama yang dihadapi perangkat desa Bahari sekarang ini dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ialah belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah distandarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Desa Bahari mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar, serta belum memanfaatkan teknologi, ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa belum baik, hal ini terjadi karena sebagian besar perangkat desa hanya berpendidikan sampai SMA. Hal ini semakin memburuk karena perangkat desa ini tidak memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi komputer.

Melihat situasi permasalahan tersebut di atas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Bahari.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya sebagai perwujudan tanggung jawab dosen untuk melaksanakan tanggungjawab dalam hal tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan rutin setiap tahun pada masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dan menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian yang dipelajari untuk diterapkan

kepada masyarakat. Kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan sekaligus melengkapi keterampilan dosen dan mahasiswa.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, adapun tujuan dari pengabdian masyarakat dilaksanakan ialah:

1. Untuk memberikan pendampingan pembinaan tata administrasi desa menggunakan teknologi (*Computer*) kepada aparatur desa
2. Untuk memberikan pemahaman kepada para aparatur desa terkait administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sebagai basis data dan informasi terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Bahari.

Ada dua output yang menjadi target dalam PKM ini. Pertama, perangkat Desa Bahari mempunyai keterampilan dalam mengelola administrasi desa menggunakan teknologi komputer. Kedua, perangkat desa memiliki kemampuan untuk tertib administrasi.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Learning And Action* (PLA) atau Proses Belajar dan Praktek secara Partisipatif. PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan nyata yang relevan dengan materi penguatan kegiatan tertip administrasi desa (Asmanang La Ode et al, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan pendampingan. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur perangkat Desa Bahari Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan PKM dilaksanakan di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 25 -27 November 2019

Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan praktik. Tim PKM dalam kegiatan ini dalam rangka memecahkan masalah tersebut ialah dengan melakukan Pelatihan Administrasi Kantor Desa, dengan cara;

1. Memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Pelatihan Mendemonstrasikan pengisian Administrasi Desa menggunakan komputer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa karena administrasi menjadi indikator penunjang dalam tata pelaksanaan pemerintahan. Pengelolaan administrasi pada pemerintahan desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa itu sendiri. Dengan terbentuknya administrasi desa yang baik, akan terbentuk tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam kegiatan mengenai administrasi desa diikuti oleh seluruh aparatur Desa Bahari, pada saat penyampaian materi para peserta ternyata baru mengetahui ada panduan pengelolaan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Para peserta mengakui bahwa selama ini, mereka tidak membuat administrasi sesuai dengan aturan.

**Tabel 1.** Tahapan Kegiatan PKM

No	Tahapan Kegiatan	Metode yang Digunakan	Keterangan
1	Survey dan Penetapan Wilayah Mitra	Pertemuan dan diskusi	Tim PKM, kepala desa, dan aparatur perangkat desa
2	Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar.	Ceramah konsep sistem administrasi desa.	Tim PKM dan aparatur perangkat desa
3	Pendampingan dan Praktek Pembuatan Administrasi Desa menggunakan <i>Computer</i>	Mendampingi aparatur perangkat desa dalam pembuatan arsip desa dan administrasi desa	Tim PKM dan aparatur perangkat desa
4	Perbaikan Hasil Pembuatan Administrasi Desa menggunakan <i>Computer</i>	Melakukan perbaikan administrasi desa bersama dengan perangkat desa sesuai dengan hasil pendampingan dan praktek	Tim PKM, kepala desa dan aparatur Perangkat desa

Perangkat Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi desa. Untuk itu, diadakanlah kegiatan pengabdian dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas perangkat desa di Desa Bahari. Penjelasan tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan TIM PKM dibagi menjadi tiga tahapan. Beberapa tahapan tersebut akan dijelaskan pada bagian poin selanjutnya.

### 3.1 Survey dan Penetapan Wilayah Mitra

Tujuan umum melakukan survei lapangan adalah untuk mengamati secara langsung lokasi wilayah mitra. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan bagi topik pembahasan guna pengembangan wawasan dan peningkatan kinerja bagi para peserta PKM. Tujuan survei lapangan adalah agar memahami tentang pengumpulan data/informasi, dapat mengetahui cara mengumpulkan data/informasi. Survei lapangan dilakukan secara kelompok.

Hasil *Survey* yang dilakukan oleh Tim PKM bahwasanya aparatur desa dalam tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum adanya sistem administrasi desa yang lengkap sesuai dengan pedoman yang telah di standarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, aparatur desabahari juga belum memahami cara mengisi administrasi menggunakan komputer. Masalah tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan desa di desa bahari mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar dan cara menggunakan komputer.

Setelah itu dalam kegiatan pengabdian ini, Tim PKM melakukan sosialisasi kepada perangkat desa berkaitan dengan kegiatan ini. Sosialisasi diadakan di Kantor Desa Bahari dan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat.



**Gambar 1.** Sosialisasi Kegiatan

### 3.2. Penyampaian Materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar

Tim PKM memberikan paparan materi tentang administrasi pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi

Penyampaian materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tentang Administrasi Umum

Cara pembuatan dan mengisi Buku Peraturan Di Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Inventaris Dan Kekayaan Desa, Buku Aparat Pemerintah Desa, Buku Tanah Kas Desa, Buku Tanah Di Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Lembaran Desa Dan Berita Desa

2. Tentang Administrasi Penduduk

Cara pembuatan dan mengisi Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk Desa, Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku Penduduk Sementara, Buku Kartu Tanda Penduduk Dan Buku Kartu Keluarga

3. Tentang Administrasi Keuangan Desa

Cara pembuatan dan mengisi Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Buku Rencana Anggaran Biaya, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Bank Desa

4. Tentang Administrasi Pembangunan

Cara pembuatan dan mengisi Buku Rencana Kerja Pembangunan, Buku Kegiatan Pembangunan, Buku Inventaris Hasil-Hasil Pembangunan, Buku Kader Pemberdayaan Masyarakat,

*Pendampingan dan Praktek Pembuatan Administrasi Desa menggunakan Komputer*

Bersama-sama dengan perangkat desa melakukan cara pembuatan administrasi desa, administrasi penduduk, administrasi

keuangan desa, administrasi pembangunan, serta melakukan simulasi cara pengisian administrasi desa dan mengklasifikasikan arsip dokumen menggunakan komputer.

Menurut Kepala Desa Bahari, pelaksanaan simulasi ini sangat membantu dalam memahami secara langsung cara pembuatan administrasi dan cara pengisian administrasi desa menggunakan komputer.



**Gambar 3.** Praktek Pembuatan Administrasi Desa menggunakan *Computer*

Kegiatan PKM ini kiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga perangkat desa dapat memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola administrasi di desa.

*3.4 Perbaikan Hasil Pembuatan Administrasi Desa menggunakan Komputer*

Setelah dilakukan kegiatan pelatihan kepada aparatur desa di Desa Bahari didapatkan hasil bahwa, aparatur telah memahami tata cara pembuatan administrasi dan pengisian administrasi pemerintahan desa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan semua staf di Kantor Desa Bahari dapat mempraktekannya menggunakan komputer.

### KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian tentang pembinaan administrasi desa di Desa Bahari, mulai dari awal pelaksanaan yakni survei penetapan desa mitra, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi Tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sampai pada pembuatan dan pengisian administrasi desa menggunakan komputer, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian seperti ini sangat dinantikan oleh perangkat desa dalam upaya menata administrasi desa yang selama ini belum lengkap sistem administrasinya. Perangkat desa yang menjadi target sasaran kegiatan pengabdian ini sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi, serta simulasi pengisian administrasi desa menggunakan komputer.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bahari diperoleh beberapa hasil sesuai target. Pertama, aparatur desa Bahari telah memahami penataan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016. Kedua, Aparatur Desa Bahari telah mengetahui tata cara pembuatan dan pengisian administrasi pemerintahan desa menggunakan komputer, dan dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, M. (2019). PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR. *DINAMISIA - Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 76–84.
- Asmanang La Ode, Herman. Tawakal, Faris, Indra, Puadji Fahrul, Sa'ban, L.M. Azhar, H. (2020). PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA WAJAJAYA. *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87–94. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/integritas/article/view/518/442>
- Sondakh, S. S., 1, Kimbal, M., 2, Kairupan, J., & 3. (2014). *IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA*.
- Suherman, A. (2019). Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.50>
- Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).
- Taufiq, Otong Husni & Hermawandi, D. (2007). *Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance*. 145–152.